

Lampiran Script Wawancara

Responden : Sekertaris Desa (A1)

Tanggal : 26 Desember 2018

Tempat : Kantor Desa Tirtomartani

Pukul : 10.30 WIB – 11.00 WIB

Hasil Wawancara

1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan ADD?

“Jadi di Desa Tirtomartani itu diadakan musyawarah padukuhan baru nanti musyawarah desa sehingga masyarakat cukup berperan dalam perencanaan, pengelolaan dan juga pengawasan penggunaan dana yang ada di desa sehingga partisipasi masyarakat kita anggap cukup bagus sehingga nanti bisa sekaligus memberikan pengawasan pada pelaksanaan kegiatan penggunaan dana-dana yang ada di desa”

2. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan ADD?

“Musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Perwakilan Masyarakat baik itu tokoh-tokoh masyarakat tokoh agama maupun kelompok-kelompok yang ada di Desa Tirtomartani”

3. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?

“Jadi usulan yang diperoleh dari musduk yang sesuai RPJM desa akan kita akomodasi tetapi usulan yang hanya keinginan perangkat desa atau masyarakat desa akan kita kaji ulang dengan tim”

4. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dalam proses perencanaan pengelolaan ADD?

“ADD yang dikelola oleh desa dalam proses perencanaan penggunaannya kita mulai dari musyawarah desa kemudian ditindaklanjuti dalam musyawarah pembangunan desa kemudian setelah hasil musyawarah itu selesai kita susun dalam bentuk APBDES kita sampaikan kepada masyarakat dalam bentuk pengumuman berupa balihho dan juga penyampaian APBDES kepada perangkat desa dan juga dukuh untuk nanti dipelajari dan disampaikan kepada masyarakat”

5. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dalam proses pelaksanaan pengelolaan ADD?

“jadi APBDES yang telah kita susun bersama BPD kita pampangkan ditempat-tempat strategis yang ada disemua padukuhan dan juga dihalaman balai desa sehingga masyarakat secara umum dapat mengetahui anggaran yang dikelola oleh desa termasuk didalamnya Alokasi Dana Desa”

6. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam proses pelaksanaan pengelolaan ADD?

“Jadi rencana yang telah disepakati kita laksanakan, SPJ penggunaan dana desa disusun oleh masing-masing kegiatan dan hasil pertanggungjawaban ini kita sampaikan kepada BPD untuk disepakati kemudian kita laporkan kepada pemerintah kabupaten yang ada diatas sehingga dapat dilihat penggunaannya baik itu Dana Desa, ADD maupun Dana-Dana yang lain”

7. Apakah semua kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai target?

“ya ada beberapa kegiatan yang tertunda dan tidak terlaksana karena dianggap sudah tidak relevan lagi untuk dilaksanakan”

8. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan ADD?

“sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pemerintah di atas, ada laporan semester pertama, laporan semester akhir tahun dan pertanggungjawaban anggaran itu adalah laporan yang kita susun kita sampaikan kepada pemerintah sekaligus kita sampaikan laporan itu dipapan-papan pengumuman yang ada di desa maupun di setiap padukuhan”

9. Apakah dalam penerimaan dan pengeluaran telah disertai bukti pendukung yang sah?

“Iya jadi karena ini menggunakan dana Negara setiap pengeluaran itu kita lampiri ada kwitansi, ada daftar hadir kalau ya daftar hadir, ada bukti setoran pajak dan diketahui oleh bendahara dan kepala desa”

10. Apakah laporan pertanggungjawaban anggaran sudah dibuat dan dilaporkan secara tertib?

“Karena Aloksi dana desa itu kadang bisa cair diakhir tahun sehingga dari pelaksana kegiatan kadang terdesak waktu dalam membuat laporan mungkin ada beberapa administrasi yang tertinggal sehingga itu jadi permasalahan”

11. Apakah ada evaluasi untuk membahas kegiatan yang sudah terlaksana?

“Biasanya setelah kegiatan satu semester dua kali kita mengadakan musyawarah pemerintah desa untuk melihat kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana kemudian kendala-kendala yang dihadapi dengan harapan kendala itu dapat teratasi dan pelaksanaan di semester berikutnya triwulan berikutnya itu lebih baik jadi kita selalu mengadakan evaluasi satu bulan sekali untuk pemerintah desa untuk membahas kegiatan yang sudah dilaksanakan”

Lampiran Script Wawancara

Responden : Ketua BPD Desa Tirtomartani (A2)

Tanggal : 22 Januari 2019

Tempat : Rumah

Pukul : 09.30 WIB – 10.00 WIB

Hasil Wawancara

1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan ADD?

“Nggih jadi partisipasi masyarakat itu ya diawali dari usulan-usulan semua kegiatan perencanaan baik yang namanya fisik maupun non fisik iyu asalnya dari tingkat padukuhan yang namanya musduk jadi dari pak dukuh itu mengumpulkan warganya kira-kira apa yang mau diusulkan ditingkat padukuhan dari masing-masing padukuhan desa tirtomartani itukan dari 17 padukuhan la itu masing-masing padukuhan kan membuat perencanaan kira-kira kegiatan apa yang bisa dilaksanakan di tingkat padukuhan jadi dari 17 padukuhan itu kemudian nanti disaring lagi ditingkat desa yang dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat, pak dukuh dan juga BPD yang ada dimasing-masing padukuhan sehingga disana di tingkat desa nantinya akan dirangkum semua, kegiatan yang masuk dari masing-masing padukuhan jadi partisipasinya memang sudah dari bawah semua yang diusulkan ditingkat desa dikerjakan ditingkat desa adalah hasil dari usulan masyarakat yang paling bawah”

2. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dalam proses pelaksanaan pengelolaan ADD?

“Jadi semua dana-dana yang sampai ke desa kemudian disusun dalam APBDES, itu dari pihak desa memang sudah transparan, transparan dalam arti apa? dalam arti kalau kita ke kantor desakan kita pasti lihat

background atau blackdrob itu yang disana tertulis kegiatan apa saja yang ada di tingkat desa dari dananya, dari kegiatannya apa sudah terpampang di papan pengumuman yang bentuknya pakai blackdrob itu, kalau panjenengan ke desa mesti bisa baca disana ada kegiatan yang setiap tahunnya selalu dipasang disana, kemudian pengumuman-pengumuman yang ada ditingkat padukuhan itukan juga ada disana kegiatan yang ada didesa dan anggarannya terpampang dan kegiatan yang telah dilaksanakan di padukuhan itupun semua sudah menggambarkan transparansi volumenya berapa, dananya berapa”

3. Apakah ada evaluasi untuk membahas kegiatan yang sudah terlaksana?

“Ada yang masuk di APBDES yang setiap tahunnya dibahas atau disepakati bersama BPD dan kepala desa maupun perangkat desa itu mesti ada evaluasi setiap akhir tahun dari kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh desa itu sampai sejauh mana apakah sudah sesuai dengan perencanaan mulai dari awal pelaksanaan sampai akhir itu kita evaluasi kalau yang belum sempurna ya disempurnakan yang belum bisa dijangkau secara keseluruhan ya dilanjutkan ditahun berikutnya jadi mesti ada evaluasi”

Lampiran Script Wawancara

Responden : Kepala Dukuh Padukuhan Pundung (A3)

Tanggal : 14 Maret 2019

Tempat : Rumah

Pukul : 19.30 WIB – 20.00 WIB

Hasil Wawancara

1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan ADD?

“Jadi masyarakat diwilayah Padukuhan berperan aktif diawali dengan musyawarah ditingkat padukuhan Pak Dukuh menumpulkan semua unsure mdan komponen yang ada di Padukuhan diantaranya RT, RW, Tokoh Masyarakat, Karangtarunna, PKK, Ketua Kelompok tani, Tokoh Agama, Limas, Jaga Warga dan lain-lain semua diajak bermusyawarah untuk merencanakan dan menginventaris kegiatan yang ada di padukuhan setelah semua disusun dan dikelompokkan kemasing-masing bidang diantaranya bidang pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dan akhirnya diprioritaskan msudah cukup transparanjadi usulan padukuhan dan dibawa ke musrembangdes”

2. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dalam proses pelaksanaan pengelolaan ADD?

“Jadi transparansi menjadi hal yang wajib dilakukan desa dalam rangka lancarnya roda pemerintahan baik semua dana yang masuk lewat rekening bendahara desa dan keluarnya akan selalu dilaporkan, sebagai contoh dalam kegiatan pengecoran jalan setelah selesai juga dipasang papan informasi yang memuat besarnya anggaran dan volume kegiatan tersebut, jadi saya anggap pemerintah desa telah transparan”

3. Apakah ada evaluasi untuk membahas kegiatan yang sudah terlaksana?

“Iya, jadi evaluasi memang selalu dilakukan oleh pemerintah desa disetiap triwulan semester dan akhir tahun”

Lampiran Script Wawancara

Responden : Kepala Dukuh Padukuhan Pundung (A3)

Tanggal : 16 Juli 2019

Tempat : Rumah

Pukul : 19.30 WIB – 20.00 WIB

Hasil Wawancara

1. Apakah laporan pertanggungjawaban anggaran sudah dibuat dan dilaporkan secara tertib?

“Pembukuan selalu saya buat mas tetapi kadang dari tim pelaksana tingkat dusun dalam memberikan data dukung untuk pembelian kadang terlambat, kadang tidak ada kuitansi sehingga itu menjadi kendala dalam menyelesaikan pembukuan”

2. Apakah dalam penerimaan dan pengeluaran telah disertai bukti pendukung yang sah?

“Iya itu wajib mas, karena aturannya memang seperti itu”